

Penerapan Aplikasi Laporan Keuangan di Kementerian Indonesia: Rekonsiliasi *Single Database* Sakti

Marshanda Aisha Djuanda¹, Rizki Hamdani²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 0274-898444, e-mail: marshanda.djuanda@gmail.com

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 0274-898444, e-mail: rizki.hamdani@uii.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Article history:

Received 30 Mei 2023

Received in revised form 2 Juni 2023

Accepted 10 Juni 2023

Available online 1 Juli 2023

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi rekonsiliasi laporan keuangan periode triwulan III tahun 2022 pembaruan single database berbasis Aplikasi SAKTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Subjek pada penelitian adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan memiliki objek penelitian rekonsiliasi laporan keuangan periode triwulan III tahun 2022 pasca penerapan single database Aplikasi SAKTI. Metode dilakukan dengan wawancara dan pengumpulan dokumen melalui jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian tertentu hingga mendapatkan data menggunakan teknik analisis data ineraktif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tentang proses rekonsiliasi laporan keuangan triwulan III 2022 berbasis Aplikasi SAKTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang merupakan proses penyandingan data yang berperan dalam memastikan kesesuaian dan kebenaran data transaksi terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat mengklasifikasi terjadinya perbedaan antara data satuan kerja dengan data Kantor Pelayanan Kebendaharaan Negara dari sumber yang sama untuk membentuk data yang andal dan akuntabel. Proses rekonsiliasi saat ini dilakukan pembaruan secara otomatis dengan penerapan single database pada Aplikasi SAKTI. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang analis pengelolaan keuangan, operator sakti modul bendahara dan pelaporan, verifikasi keuangan masih ditemukan kendala seperti pada proses migrasi saldo awal ke sakti banyak belum terselesaikan yang menjadikan belum input setoran oleh beberapa satker sehingga adanya selisih rekon internal, persediaan yang belum teregister, data inventaris yang belum terselesaikan dan juga diakibatkan dari kelalaian SDM di lingkup internal itu sendiri, sehingga seringkali terjadinya selisih pada transaksi saat periode rekonsiliasi berlangsung.

Kata kunci: Rekonsiliasi, Laporan Keuangan, Single Database, Aplikasi SAKTI

ABSTRACT

This study aims to evaluate the reconciliation of financial statements for the third quarter of 2022 by updating a single database based on the SAKTI Application, Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. The subject of the research is the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and has the research object of reconciliation of financial statements for the third quarter of 2022 after the implementation of the SAKTI Application single database. The method was carried out by interviewing and collecting documents through qualitative descriptive research types in describing an event or certain events to obtain data using interactive data analysis techniques with a qualitative approach. The results of the research show the reconciliation process for the third quarter of 2022 financial reports based on the SAKTI Application of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, which is a data matching process that plays a role in ensuring the suitability and correctness of transaction data, especially in the preparation of financial reports which can classify discrepancies between work unit data and service office data. State Treasury from the same source to form reliable and accountable data. The reconciliation process is currently being updated automatically by implementing a single database in the SAKTI Application. Based on the results of interviews with financial management analysts, sacred operators, treasurer and reporting modules, financial verifiers still found problems such as the initial balance migration process to Sakti, many of which had not been resolved, which resulted in the input of deposits not being made by several work units, resulting in differences in internal accounts, inventories that had not been registered, inventory data that has not been completed and also results from HR negligence in the internal scope itself, so that discrepancies often occur in transactions during the reconciliation period.

Keywords: Reconciliation, Financial Statements, Single Database, SAKTI Application

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan pemilik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diatur pada Undang Undang No. 17 Tahun 2003. Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab diikuti dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berkaitan dengan sektor Pemerintah Indonesia yang telah menerapkan basis akuntansi akrual (Bisri, 2013). Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah mewujudkan kondisi ideal dalam menghasilkan laporan keuangan dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi Pemerintah (Pusat dan Daerah). Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai salah satu satuan kerja yang berada di Ibukota Jakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Pusat. Urusan tersebut mencakup bidang perdagangan pada pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan kewenangan Pemerintah. Pada hal tersebut berkaitan dengan Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/ Lembaga. Berdasarkan penjelasan Umum UU 1/2004 yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan dalam Laporan Keuangan pemerintah untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam hal ini SAI merupakan salah subsistem dari SAPP.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah yang wajib didahului oleh proses rekonsiliasi data keuangan antara Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN menggunakan satuan kerja. Rekonsiliasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh akuntan dalam sebuah rangkaian catatan informasi *keuangan* dengan tujuan meyakinkan keandalan data dalam penyusunan laporan keuangan. Keandalan merupakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan

yang merupakan unsur informasi dalam laporan keuangan terkait pengambilan keputusan dari berbagai pihak agar data akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi pemerintah nantinya dapat diandalkan sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Widyaningrum, 2009). Maka dari itu, rekonsiliasi perlu dilakukan sebagai upaya penyusunan laporan keuangan agar dapat membentuk laporan keuangan yang kredibel dalam menilai ketelitian akurasi pencatatan pada data akuntansi.

Rekonsiliasi menjadi hal penting untuk meminimalisasi terjadinya pencatatan yang berbeda, karena hal tersebut akan berpengaruh dalam validitas dan akurasi pada data yang tersaji dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan dasar rekonsiliasi bahwa rekonsiliasi data berperan dalam memastikan kesesuaian dan kebenaran data transaksi terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat mengklasifikasi terjadinya perbedaan antara data satuan kerja dengan data Kantor Pelayanan Kebendaharaan Negara dari sumber yang sama. Munculnya perubahan sistem aplikasi dan regulasi pada proses rekonsiliasi di tahun 2022 Kementerian Keuangan R.I telah meluncurkan aplikasi berbasis web yang bernama Aplikasi SAKTI singkatan dari sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang sebelumnya menggunakan Aplikasi E-Rekon LK. Aplikasi SAKTI diciptakan sebagai upaya mengurangi banyaknya aplikasi dan menjadikan proses rekonsiliasi dapat lebih efektif, efisien serta memberikan nilai tambah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Namun, meski demikian aplikasi tersebut masih dibutuhkannya penyesuaian baru pada mekanisme rekonsiliasi melalui Aplikasi SAKTI dan MONSAKTI yaitu, aplikasi yang digunakan untuk monitoring transaksi, interkoneksi, rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan (Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPB), 2021). yang menyebabkan timbulnya kebijakan dan peraturan baru yang digunakan sebagai payung hukum dalam mengelola keuangan. Sebuah tantangan baru bagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terutama dalam tahap pengawalan implementasi SAKTI Modul Pelaporan bagian rekonsiliasi di kondisi saat ini yang mulai terjadinya perkembangan teknologi dan pembaruan secara terus menerus.

Melakukan pelaksanaan proses rekonsiliasi menjadi salah satu kunci utama sebagai langkah penyusunan laporan yang kredibel dan membentuk data yang andal serta akuntabel. Sehingga laporan keuangan akan selalu berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena perannya yang penting dalam meminimalisir terjadinya perbedaan pencatatan yang mungkin dapat berdampak pada akurasi dan validitas data yang akan disajikan ke dalam laporan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 tentang Pengendalian Internal yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah maka diperlukan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian internal di dalamnya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan melalui Aplikasi SAKTI sehingga penulis mengambil judul “Penerapan Aplikasi Laporan Keuangan di Kementerian Indonesia: Rekonsiliasi *Single Database* SAKTI”

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian tertentu (Rohiyatun, B., 2020). Meskipun penelitian menggunakan metode dengan jenis yang paling sederhana. Namun, peneliti wajib dapat mengevaluasi secara kritis dalam berbagai hal yang menjadi fokus dalam penelitiannya sesuai dengan data-data yang diperoleh baik dari pengamatan langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, peneliti berharap jenis penelitian ini dapat membantu mendeskripsikan secara jelas kondisi yang sebenarnya terjadi dan memberikan solusi mengenai kendala pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan di perusahaan yang terkait.

Sumber dan data dalam penelitian didapatkan langsung dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer yaitu, data yang didapatkan dari sumbernya dan sumber data sekunder yaitu, data yang didapatkan baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen perusahaan sebagai teknik pengumpulan data penelitian.

Dalam menganalisis data yang didapatkan, peneliti menggunakan teknik analisis ineraktif dalam penelitian kualitatif yang dilakukannya analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil wawancara observasi dan dokumentasi secara deskriptif yang merupakan catatan alami hingga penentuan data yang relevan dan disajikan untuk menggabungkan informasi dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan pada analisis proses rekonsiliasi laporan keuangan pada Aplikasi SAKTI periode triwulan III tahun 2022 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Berdasarkan peraturan terkait yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL serta S-40/PB/PB.6/2022 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2022, seluruh Kementerian Lembaga diminta menyusun Laporan Keuangan Triwulan III secara lengkap terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CALK yang dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi, yang saat ini dilakukan secara terkomputerisasi dimulai dengan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan posisi keuangan yang dimana untuk periode Triwulan III tahun 2022 data diambil pada bulan Juli, Agustus hingga September.

Seluruh transaksi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah diselesaikan di Aplikasi SAKTI dan telah terbit SHR untuk rekonsiliasi periode September 2022. Sehingga LK Triwulan III Tahun 2022 untuk setiap jenjang Unit Akuntansi & Unit Pelaporan disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober 2022 dengan menggunakan data transaksi terbuka pada Aplikasi SAKTI sampai dengan tanggal 30 September 2022.

“Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Satker, Eselon I, dan Kementerian. Pada tahun 2022 ini seluruh transaksi keuangan dan pencatatannya telah menggunakan SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi), mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan.” Rachmat Anggoro, Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Negara Bidang Akuntansi (2022).

Penggunaan sistem SAKTI diawali dengan migrasi saldo awal yang berisikan nilai persediaan, aset tetap dan neraca dari aplikasi sebelumnya (E-rekon LK). Kemudian dilanjutkan dengan penginputan transaksi maupun pendetailan pada modul bendahara, Komitmen, Aset, Persediaan dan GLP. Proses validasi dan posting jurnal dilakukan secara otomatis oleh sistem, begitu pula dengan proses rekonsiliasi dengan sistem SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) hingga penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Data per 30 September 2022 dari seluruh satker yang terdapat di SAKTI, akan dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Tingkat Kementerian.

Dalam wawancara dengan beberapa informan yang memiliki tugas terkait, dijelaskan bahwa peran rekonsiliasi sangatlah penting dilakukan sebagai proses pencocokan data transaksi keuangan guna mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (suspen) yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

“Rekonsiliasi memainkan peran penting dalam meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan akuntansi yang dapat mempengaruhi validitas dan akurasi data yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Maka dari itu, hal ini menjadi salah satu kunci terpenting dalam proses penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.” Rachmat Anggoro, Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Negara Bidang Akuntansi (2022).

Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan tahun 2022 memiliki perubahan sistem aplikasi dan regulasi dari tahun sebelumnya yang menggunakan e-Rekon&LK dan pada tahun 2022 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengenai rekonsiliasi saat ini mulai dilakukannya penggunaan Aplikasi SAKTI melalui Aplikasi MonSAKTI yang akan digunakan sebagai monitoring transaksi, interkoneksi, rekonsiliasi dan

penyusunan laporan sehingga secara garis besar identifikasi serta hasil rekonsiliasi dapat dilihat pada MONSAKTI. Perubahan tersebut menjadikan seluruh satuan kerja memerlukan penyesuaian termasuk pada tahapan baru yang perlu dipelajari dan dipahami dengan cepat.

Pada perubahan sistem tahapan rekonsiliasi laporan keuangan secara garis besar rekonsiliasi sendiri terbagi menjadi dua yaitu, Rekonsiliasi Internal dan Rekonsiliasi Eksternal SAKTI vs SPAN (SAI vs SAU) dimana proses rekonsiliasi berjalan secara otomatis dan periodik (setiap hari). Mengenai Rekonsiliasi Internal, hal tersebut merupakan proses rekonsiliasi yang dilakukan dengan menyandingkan data Saldo Neraca di GLP dengan Saldo Subledger (Modul) seperti Modul Aset tetap, Modul Persediaan, Modul Piutang dan Modul Komitmen dan Bendahara. Jika pada hasil rekonsiliasi internal terdapat selisih maka hal ini mengindikasikan adanya salah catat pada salah satu modul. Rekonsiliasi Eksternal akan menyandingkan data antara Satker yang menggunakan SAKTI dengan data KPPN yang menggunakan sistem SPAN. Data yang disandingkan antara lain Pagu Belanja, Belanja, Pengembalian Belanja, Est. Pendapatan, PNBPN, Pengembalian PNBPN, Pengembalian Pajak, Mutasi UP, Kas di BP, Kas BLU, Kas dari Hibah, pengesahan Hibah B/J/S. Data transaksi keuangan yang dicatat pada SAKTI maupun SPAN bersumber dari dokumen yang sama (DIPA, SPM, SP2D, SSBP, SSP, dll). Sehingga seharusnya tidak terdapat perbedaan data antara SAKTI dan SPAN. Jika terdapat selisih dalam rekonsiliasi eksternal mengindikasikan ada salah satu pihak yang terdapat kesalahan catat. Proses rekonsiliasi eksternal ini dilakukan setiap bulan dan satker akan mendapatkan SHR dari KPPN jika tidak terdapat selisih yang signifikan. Jika satker tidak menyelesaikan proses rekonsiliasi eksternal sesuai batas waktu yang diberikan maka satker akan mendapatkan sanksi. Hal ini dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian data antara SAKTI dan SPAN akan mengakibatkan menurunnya akuntabilitas Laporan Keuangan Negara.

“Rekonsiliasi sendiri dilakukan untuk pencocokan data dari sumber dokumen yang sama sebagai bentuk pengecekan ulang. Jadi, rekonsiliasi internal data yang di input antar modul seharusnya sama dari segi nilai transaksi begitu pula dengan rekonsiliasi eksternal antara data yang di SAKTI dan SPAN karena sumbernya juga sama sehingga seharusnya memiliki nilai yang sama.” Cucun Roslina, Penyusun LK Tingkat Kementerian (2022).

Terhadap penyesuaian mekanisme rekonsiliasi mengenai perpindahan tahun 2021 menuju 2022 telah dirasakan oleh seluruh Satker Kementerian/Lembaga.

“Sistem sebelumnya rekonsiliasi berjalan secara manual melalui penginputan hingga pengolahan hasil rekon. Namun, saat ini proses rekonsiliasi sudah berjalan secara otomatis yang kemudian hasil rekon akan diunduh untuk dilakukan analisa.” Aditya Rusdama, Analis Pengelolaan Keuangan (2022).

“Banyak penyesuaian yang perlu dipelajari karena perubahan aplikasi yang cukup banyak tetapi hal tersebut pasti memiliki manfaat yang baik terutama pada tingkat keefektifan dan efisiensi pada hasil rekonsiliasi. Namun, sebagai awalan implementasi rekonsiliasi laporan keuangan pada Aplikasi SAKTI terutama periode triwulan III tahun 2022 dapat dinilai sebagai hal yang wajar jika terdapat hambatan atau kendala di dalamnya. Tetapi mengenai pentingnya hasil rekonsiliasi untuk dianalisa maka diperlukannya evaluasi terhadap hambatan atau kendala yang terjadi hingga mendapatkan solusi terbaik untuk rekonsiliasi di periode selanjutnya” Rifqi Nur Baskara, Analis Data dan Informasi Bidang Akuntansi (2022).

Berdasarkan hal tersebut proses rekonsiliasi dilakukannya analisis data dengan tujuan bahwa rekonsiliasi sebagai salah satu sistem pengendalian baik rekonsiliasi internal maupun rekonsiliasi eksternal perlu menjadi perhatian bersama sebagai upaya pencegahan dalam meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyaluran APBN dan penerimaan negara terutama dalam penyesuaian pada Aplikasi SAKTI yang berdampak pada kualitas Laporan Keuangan. Maka dari itu, karena itu monitoring dan analisis rekonsiliasi Laporan Keuangan penting untuk dilakukan agar tidak terjadi selisih nilai antar sistem. Dengan dilakukan monitoring dan analisis rekonsiliasi, perbedaan data/nilai dapat cepat teridentifikasi dan dicari solusi penyelesaiannya. Sehingga pada akhirnya laporan keuangan dapat tersaji dengan lebih baik, handal dan akuntabel.

3.2. Kendala

Kendala terkait proses rekonsiliasi di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah terdapat kekurangan pada pengoptimalan dalam rangka pendukung penyusunan laporan keuangan akibat pemberlakuan rekonsiliasi pada aplikasi yang baru saja diterapkan pertama kali pada tahun ini. Sehingga diperlukannya penyesuaian, pembimbingan dan evaluasi secara berkala untuk seluruh satker berkaitan di Kementerian/ Lembaga.

Informasi awal didapatkan pada forum diskusi dan wawancara secara langsung mengenai kendala dalam upaya tercapai peningkatan kualitas laporan keuangan 2022.

“Masih ada satker yang belum menyelesaikan proses migrasi saldo awal ke sakti, sehingga mengakibatkan terjadinya selisih rekon internal. Terdapat selisih rekonsiliasi internal TAYL sejak Aplikasi E-Rekon/LK yang terbawa pada saldo awal tahun 2022.” Rachmat Anggoro, Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Negara Bidang Akuntansi (2022).

Hal ini terjadi dikarenakan terdapat proses mutasi dari rekonsiliasi sebelumnya yang menggunakan Aplikasi E-Rekon/LK dan pada tahun 2022 mulai dilakukannya pergantian Aplikasi dengan menggunakan Aplikasi SAKTI dan MONSAKTI. Pada beberapa kementerian termasuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia saat ini sedang mengalami masa percobaan sehingga banyak modul-modul yang perlu dipelajari kembali dari awal dikarenakan amat sangat berbeda dengan modul dan aplikasi sebelumnya. Terlebih banyaknya jumlah satker termasuk satker inaktif yang berjumlah 176 dan satker aktif berjumlah sekitar 248 pada proses triwulan III tahun 2022 berjalan hingga saat ini sudah 93% melakukan migrasi sedangkan sisanya sekitar 7% masih terkendala.

“Penyelesaiannya dilakukan secara mekanisme jurnal terpusat oleh kementerian keuangan dengan kerja menyampaikan data selisih rekonsiliasi internal sesuai dengan format pada S-40/PB/PB.6/2022 dan mencantumkan surat pertanggung jawaban yang ditandatangani oleh KPA. Sedangkan Rekonsiliasi internal TAB akan diselesaikan dengan menelusuri letak kesalahan pada setiap modul maupun melalui perbaikan sistem oleh Kemenkeu dan terdapat 36 satker yang masih terdapat selisih rekonsiliasi eksternal berupa TDK persediaan dan TDK COA yang perlu cepat diselesaikan dan diperbaiki.” Rachmat Anggoro, Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Negara Bidang Akuntansi (2022).

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pada rekonsiliasi pelaksanaan laporan keuangan periode triwulan III tahun 2022 penyusunan sudah terselesaikan. Namun, masih memiliki terdapat kendala dan permasalahan terkait prosesnya. Beberapa narasumber yang bersangkutan dan penelitian ini mengemukakan beberapa kendala yang terjadi, sebagai berikut:

“Kendala yang sempat dialami adalah terkait persediaan yang belum di register, artinya belum tercatat di operator persediaan. Kemudian, terkait piutang untuk satker setjen kebetulan kami memiliki cukup banyak piutang baik dari para staf serta pegawai PNS yang dikarenakan terdapat tuntutan dari perbendaharaan maupun ganti rugi negara yang disebabkan oleh kelalaian bendahara ataupun dari pegawai itu sendiri seperti kehilangan barang dan kehilangan barang inventaris serta beasiswa yang tidak dapat terselesaikan.” Budi Santoso, Operator Sakti Modul Bendahara dan Operator Sakti Modul Pelaporan pada Setjen Biro Kementerian Perdagangan (2022).

“Kendala kekurangan input atau belum input setoran sehingga pada saat proses rekon memiliki data selisih yang cukup banyak baik setoran belanja maupun setoran lainnya.” Yussy Fitmasari, Verifikator Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Satker ITPC (2022).

Satu hal yang juga menjadi kelemahan dalam menuju proses rekonsiliasi tersebut berlangsung sesuai yang dikemukakan oleh operator yang bersangkutan, sebagai berikut:

“Berdasarkan Kementerian Perdagangan sendiri memiliki ratusan satker yang berasal dari daerah sampai dengan pusat, kendala biasa terjadi pada satker daerah yang seringkali terkendala sinyal untuk membuka Aplikasi SAKTI karena saat ini sudah menggunakan sistem web sehingga tidak secepat satker lainnya yang memiliki sinyal lebih memadai. Kedua, saat penarikan data sementara ini Aplikasi SAKTI sendiri terkadang pada beberapa data yang ingin di input oleh operator untuk dilakukan penyusunan LK tidak muncul atau isi pada excel kosong sehingga hal tersebut dapat menghambat.” Rifqi Nur Baskara, *Analisis Data dan Informasi Bidang Akuntansi* (2022).

“Pada kendala adanya rekonsiliasi daerah yang belum selesai. Jadi, ada data data yang masih belum naik di laporan keuangan triwulan III tahun 2022 ini.” Aditya Rusdama, *Analisis Pengelolaan Keuangan* (2022).

Kompleksnya faktor permasalahan terjadi tidak hanya pada aplikasi baru yang masih dalam tahap percobaan baik yang telah dirasakan oleh Kementerian Keuangan selaku pemilik aplikasi maupun dari instansi atau kementerian yang menggunakannya melainkan pengaruh besar pada proses rekonsiliasi laporan keuangan juga diakibatkan dari kelalaian SDM di lingkup internal itu sendiri, sehingga seringkali terjadinya selisih pada transaksi saat periode rekonsiliasi berlangsung.

3.3. Upaya Mengatasi Kendala

Konsep pada penelitian ini memberikan analisis terhadap pembaruan proses rekonsiliasi laporan keuangan proses triwulan III tahun 2022 pada Aplikasi SAKTI yang mulai memanfaatkan *single database* sebagai data SAI yang berada pada Kementerian Keuangan untuk dipergunakan pada beberapa kementerian lainnya termasuk di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penyesuaian terhadap perubahan tersebut mulai ditemukan beberapa solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada dan upaya dalam mengatasi kendala yang pernah terjadi.

“Upaya Biro keuangan selaku koordinator penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian adalah secara berkala melakukan monitoring melalui aplikasi MONSAKTI terhadap komponen laporan keuangan satker seperti TDK, Saldo tidak normal dalam neraca, PAGU minus, Aset belum register dan lain-lain sehingga dapat terdeteksi lebih dini dan dapat menginformasikan kepada satker ketidaksesuaian tersebut agar dapat segera diselesaikan dan juga terus memberikan pendampingan jika mereka mengalami kesulitan.” Rachmat Anggoro, *Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Negara Bidang Akuntansi* (2022).

Pada penyelesaian kendala yang umum terjadi, Kementerian Keuangan telah memberikan petunjuk teknis penyelesaiannya pada surat S-40/PB/PB.6/2022. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III ini juga merupakan upaya mitigasi resiko sebelum menyusun laporan keuangan akhir tahun. Sehingga diharapkan kendala-kendala yang terjadi pada LK Triwulan III ini tidak terjadi pada laporan keuangan tahunan, sehingga laporan keuangan tahunan dapat tersusun dan disajikan secara handal dan akuntabel. Hal tersebut menjadi poin penting karena laporan keuangan tahunan ini yang nantinya akan Audit oleh BPK RI.

“Mengenai masalah persediaan kita mulai mengupayakan dengan melakukan koordinasi dengan operator persediaan. Kemudian, untuk mencegah hal hal yang sampai dengan belum ter register sebaiknya persediaan tersebut dapat diinput secara daily agar tidak ada data yang terlewat karena ditakutkannya jika terlalu menumpuk maka berkas berkas dapat lebih mudah rusak dan hilang. Mengenai permasalahan piutang diharapkannya kami mendapatkan operator piutang secepatnya sehingga dapat mempermudah upaya penyelesaian terkait piutang satker setjen.” Budi Santoso, *Operator Sakti Modul Bendahara dan Operator Sakti Modul Pelaporan pada Setjen Biro Kementerian Perdagangan* (2022).

“Solusinya adalah sebaiknya pada saat bendahara setelah melakukan pengembalian kas negara dan membayar ke bank untuk bukti pembayaran seharusnya segera di input secara langsung tanpa ditunda agar tidak terjadi kekeliruan perhitungan bahkan selisih pada rekon hingga susah tidak ditemukan. Pada intinya seluruh penginputan transaksi perlu dipercepat sebelum jatuh tempo periode rekonsiliasi.” Yussy Fitmasari, *Verifikator Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Satker ITPC* (2022).

Pada hasil analisis yang diperoleh sebagai upaya mengatasi masalah atau kendala yang terjadi dilihat berdasarkan karakteristik persoalan mengenai kendala yang terjadi, pentingnya dalam peningkatan kualitas proses rekonsiliasi laporan keuangan triwulan III tahun 2022 baik pada Aplikasi SAKTI maupun pengarahan kepada seluruh satker untuk terus berkoordinasi dengan pihak APK, SITP dan Kementerian Keuangan selaku pengelola aplikasi terkait secara berkala pada saat proses rekonsiliasi laporan keuangan yang sudah diberlakukan. Berbagai pelatihan dan bimbingan juga diperlukan secara menyeluruh bagi satker yang terlibat terutama pada SDM dari Biro Keuangan dengan tujuan menyamakan persepsi dari Aplikasi SAKTI demi mempermudah dalam mengimplementasi proses pencocokan laporan keuangan melalui pembaruan Aplikasi SAKTI dari penggunaan hingga pada proses rekonsiliasi laporan keuangan yang masih terkendala terutama untuk periode triwulan III tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik kembali dan lebih cepat terselesaikan.

4. KESIMPULAN

Pada hasil analisis penelitian ini, berkesimpulan bahwa evaluasi rekonsiliasi laporan keuangan periode triwulan III tahun 2022 pembaruan *single database* berbasis Aplikasi SAKTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada perihal penyusunan dan penyampaian laporan keuangan telah berjalan cukup baik dan lengkap sesuai dengan pedoman pada PMK 222/PMK serta penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Satker, Eselon I, hingga Kementerian. Mengenai pelaksanaan rekonsiliasi setelah adanya pembaruan aplikasi, saat ini proses sudah berjalan secara otomatis dan periodik oleh sistem SAKTI dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada berkurangnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan dimana rekonsiliasi terbagi menjadi dua proses yaitu, Rekonsiliasi Internal dan Rekonsiliasi eksternal. Namun, tidak menutup kemungkinan masih adanya kendala dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan pada Aplikasi SAKTI seperti pada proses migrasi saldo awal ke sakti banyak belum terselesaikan yang menjadikan belum input setoran oleh beberapa satker sehingga adanya selisih rekon internal, persediaan yang belum teregister, data inventaris yang belum terselesaikan dan juga diakibatkan dari kelalaian SDM di lingkup internal itu sendiri, sehingga seringkali terjadinya selisih pada transaksi saat periode rekonsiliasi berlangsung. Sehingga secara keseluruhan, pada hasil evaluasi upaya dalam mengatasi kendala tersebut dibutuhkan pelatihan dan bimbingan bersama seluruh satker dengan tujuan menyamakan persepsi dari Aplikasi SAKTI demi mempermudah dalam mengimplementasi proses pencocokan laporan keuangan melalui pembaruan Aplikasi SAKTI dari penggunaan hingga pada proses rekonsiliasi laporan keuangan.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan bagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terkait pencapaian tingkat efektivitas dan efisiensi setinggi mungkin dalam semua upaya operasional pengelolaan keuangan pada bidang akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggoro, R. (2022). "Rekonsiliasi Laporan Keuangan. *Hasil Wawancara Pribadi*: 22 November 2022, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- [2] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, J. (2017a). *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/150607/pmk-no-213pmk052013>
- [3] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, J. (2017b). *Standar operasional prosedur UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- [4] Bisri, H. (2013, November). *Pengelolaan Keuangan Negara Harus Transparan dan Akuntabel*. <https://www.bpk.go.id/news/pengelolaan-keuangan-negara-harus-transparan-dan-akuntabel>
- [5] Desnovira, A. (2019). *Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kecamatan Salimpaung Sebelum Dan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*. 5–10.
- [6] Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPB), K. keuangan. (2015). *PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=468>
- [7] Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPB), K. keuangan. (2021). *Rekonsiliasi Tingkat AUPPA-W*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uuno-17-tahun-2003>

Penerapan Aplikasi Laporan Keuangan di Kementerian Indonesia: Rekonsiliasi *Single Database* SAKTI
(Marshanda Aisha Djuanda)

- [8] Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPB), K. keuangan. (2022). *Overview Pelaksanaan Rekonsiliasi Tahun 2022 dengan MonSAKTI*.
- [9] Fitmawati, Y. (2022). "Rekonsiliasi Laporan Keuangan. *Hasil Wawancara Pribadi*: 21 November 2022, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- [10] Kementerian Keuangan, D. J. P. (DJPb). (2021). *Peran Penting Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/benteng/id/data-publikasi/189-berita/2965-peran-penting-rekonsiliasi-dalam-penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah.html>
- [11] Khuluq, A., Windu Gata, Putra, J. L., & Novitasari, H. B. (2018). Rekonsiliasi Data Keuangan Pemerintah Pasca Penerapan Single Database Sakti Menggunakan Finite State Automata. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 769–781.
- [12] Natasyah, A., & Cahyati, I. (2021). *Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Gresik Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di BPPKAD Kabupaten Gresik. 1021810005*.
- [13] Nur, R. (2022). "Rekonsiliasi Laporan Keuangan. *Hasil Wawancara Pribadi*: 22 November 2022, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- [14] Perbendaharaan, D. J. (2018). *Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-36/PB/2009*.
- [15] Perdagangan, K. (2010). *Tugas dan Fungsi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. <https://www.kemendag.go.id>
- [16] Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. *Scholar Articles*. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bkRyeAoAAAAJ&citation_for_view=bkRyeAoAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
- [17] Rohiyatun, B., M. (2020). Manajemen Perkantoran Modern. *Jurnal Visionary (VIS)*.
- [18] Roslina, C. (2022). "Rekonsiliasi Laporan Keuangan. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 November 2022, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- [19] Rusdama, A. (2022). "Rekonsiliasi Laporan Keuangan. *Hasil Wawancara Pribadi*: 23 November 2022, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- [20] Santoso, B. (2022). "Rekonsiliasi Laporan Keuangan. *Hasil Wawancara Pribadi*: 21 November 2022, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
- [21] Supriyatno. (2014). *Pengaruh penerapan SAP, kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi dan rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Makasar II*.
- [22] Utami. (2020). *Pelaksanaan rekonsiliasi dan pelaksanaan telaah laporan keuangan Satuan Kerja Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat*.
- [23] Widyaningrum, C. (2009). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Studi Empiris, Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN*.